



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR
RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/walikota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019.
- (2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan ditujukan untuk:
 - a. mendorong kelancaran arus barang;
 - b. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. menjaga kestabilan harga;
 - d. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - e. meningkatkan kesempatan berusaha; dan
 - f. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik bangunan maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tugaskan kepada pihak lain.
- (4) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Bupati/walikota dilarang mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, kecuali

yang bersangkutan berhalangan tetap dan/atau tidak lagi memenuhi syarat.

- (6) Bupati/walikota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan memberikan dampak peningkatan kinerja;
 - d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana distribusi Perdagangan setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bupati/walikota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG
DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019

TAHAP I

| NO. | PENERIMA TUGAS | TIPE PASAR | NAMA PASAR | ALOKASI (Rupiah) |
|-----|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------|
| I | PROVINSI ACEH | | | |
| | 1. Wali Kota Banda Aceh | D | Terpadu Lampulo Tahap III | 4.000.000.000 |
| | 2. Bupati Aceh Singkil | D | Suro | 4.000.000.000 |
| | 3. Bupati Aceh Aceh Barat Daya | D | Manggeng | 4.000.000.000 |
| | 4. Bupati Aceh Utara | D | Alue Papeun | 4.000.000.000 |
| II | PROVINSI SUMATERA UTARA | | | |
| | 5. Bupati Mandailing Natal | D | Kotanopan | 4.000.000.000 |
| | 6. Bupati Tapanuli Tengah | D | Binjohara | 4.000.000.000 |
| | 7. Wali Kota Sibolga | D | Modern Nauli | 4.000.000.000 |
| | 8. Bupati Serdang Bedagai | D | Pantai Cermin | 4.000.000.000 |
| | 9. Bupati Nias Utara | D | Pekan Nalua | 4.000.000.000 |
| | 10. Bupati Simalungun | D | Kerasaan | 4.000.000.000 |

| | | | | |
|------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------|
| III | PROVINSI SUMATERA BARAT | | | |
| | 11. Bupati Tanah Datar | D | Nagari Simabur | 4.000.000.000 |
| | 12. Bupati Sijunjung | D | Sijunjung | 4.000.000.000 |
| IV | PROVINSI RIAU | | | |
| | 13. Bupati Bengkalis | D | Desa Panbang Baru | 4.000.000.000 |
| V | PROVINSI KEPULAUAN RIAU | | | |
| | 14. Bupati Karimun | D | Modern Kecamatan Meral | 4.000.000.000 |
| | 15. Wali Kota Batam | D | Batu Aji | 4.000.000.000 |
| VI | PROVINSI JAMBI | | | |
| | 16. Bupati Tanjung Jabung Barat | D | Parit I | 4.000.000.000 |
| VII | PROVINSI SUMATERA SELATAN | | | |
| | 17. Bupati Ogan Komering Ulu Timur | D | Sriwangi | 4.000.000.000 |
| | 18. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir | D | Babat | 4.000.000.000 |
| | 19. Wali Kota Pagar Alam | D | Dempo Utara | 4.000.000.000 |
| VIII | PROVINSI BENGKULU | | | |
| | 20. Bupati Bengkulu Selatan | D | Kota Medan | 4.000.000.000 |
| | 21. Bupati Bengkulu Tengah | D | Desa Tabah Lagan | 4.000.000.000 |
| | 22. Bupati Bengkulu Utara | D | Air Tenang | 4.000.000.000 |
| | 23. Bupati Rejang Lebong | D | Daging | 4.000.000.000 |
| | 24. Bupati Kaur | D | Inpres Bintuhan | 4.000.000.000 |
| IX | PROVINSI LAMPUNG | | | |
| | 25. Bupati Lampung Utara | D | Tata Karya | 4.000.000.000 |
| | 26. Bupati Tulang Bawang Barat | D | Mulya Asri | 4.000.000.000 |
| | 27. Bupati Lampung Tengah | D | Kalirejo | 4.000.000.000 |
| | 28. Bupati Lampung timur | D | Way Jepara 2 | 4.000.000.000 |

| | | | | |
|------|--------------------------|---|------------------------|---------------|
| X | PROVINSI JAWA BARAT | | | |
| | 29. Bupati Garut | D | Cisewu | 4.000.000.000 |
| | 30. Bupati Cianjur | D | Kecamatan Tanggeung | 4.000.000.000 |
| | 31. Bupati Kuningan | D | Kepuh | 4.000.000.000 |
| | 32. Bupati Karawang | D | Kosambi | 4.000.000.000 |
| | 33. Bupati Subang | D | Ciasem | 4.000.000.000 |
| | 34. Bupati Bandung Barat | D | Desa Citalem | 4.000.000.000 |
| XI | PROVINSI JAWA TENGAH | | | |
| | 35. Bupati Blora | D | Banjarejo | 4.000.000.000 |
| | 36. Bupati Boyolali | D | Nogosari | 4.000.000.000 |
| | 37. Bupati Temanggung | D | Rejowinangun Ngadirejo | 4.000.000.000 |
| | 38. Bupati Wonosobo | D | Mojotengah | 4.000.000.000 |
| | 39. Bupati Sukoharjo | D | Mulur | 4.000.000.000 |
| | 40. Bupati Pati | D | Wedarijaksa | 4.000.000.000 |
| | 41. Bupati Kudus | D | Kalirejo | 4.000.000.000 |
| XII | PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | | | |
| | 42. Bupati Gunungkidul | D | Umum Karangijo | 4.000.000.000 |
| XIII | PROVINSI JAWA TIMUR | | | |
| | 43. Bupati Malang | D | Sayur Bantur | 4.000.000.000 |
| | 44. Bupati Sumenep | D | Guluk-guluk | 4.000.000.000 |
| | 45. Bupati Bojonegoro | D | Rojokoyo Banjarejo | 4.000.000.000 |
| | 46. Bupati Pasuruan | D | Warung Dowo | 4.000.000.000 |
| | 47. Bupati Tuban | D | Kenduruan | 4.000.000.000 |
| | 48. Bupati Lumajang | D | Klojen | 4.000.000.000 |
| | 49. Wali Kota Mojokerto | D | Prapanca | 4.000.000.000 |
| | 50. Bupati Trenggalek | D | Karangan | 4.000.000.000 |
| | 51. Bupati Nganjuk | D | Kerep | 4.000.000.000 |
| | 52. Bupati Blitar | D | Wlingi | 4.000.000.000 |
| | 53. Bupati Probolinggo | D | Paiton | 4.000.000.000 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---|------------------|---------------|
| XIV | PROVINSI BALI | | | |
| | 54. Kota Denpasar | D | Anyarsari | 4.000.000.000 |
| XV | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | | | |
| | 55. Bupati Lombok Timur | D | Paokmotong Raya | 4.000.000.000 |
| | 56. Bupati Lombok Barat | D | Gunungsari | 4.000.000.000 |
| XVI | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | | | |
| | 57. Bupati Sumba Barat | D | Desa Malata | 4.000.000.000 |
| | 58. Bupati Sumba Barat Daya | D | Waimangura II | 4.000.000.000 |
| | 59. Bupati Alor | D | Likuwatang | 4.000.000.000 |
| | 60. Bupati Nagekeo | D | Marilewa | 4.000.000.000 |
| | 61. Bupati Lembata | D | Balauring | 4.000.000.000 |
| | 62. Bupati Timor Tengah Selatan | D | Mutis Tuan | 4.000.000.000 |
| XVII | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | | | |
| | 63. Bupati Ketapang | D | Kyai Bandar Laut | 4.000.000.000 |
| | 64. Bupati Kayong Utara | D | Sukadana | 4.000.000.000 |
| | 65. Bupati Sambas | D | Aruk | 4.000.000.000 |
| | 66. Bupati Sanggau | D | Jarai | 4.000.000.000 |
| XVIII | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | | | |
| | 67. Bupati Barito Selatan | D | Buntok | 4.000.000.000 |
| XIX | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | | | |
| | 68. Bupati Tanah Bumbu | D | Niaga Bersujud | 4.000.000.000 |
| | 69. Bupati Banjar | D | Sungai Tabuk | 4.000.000.000 |
| | 70. Bupati Tabalong | D | Kelua | 4.000.000.000 |
| XX | PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | | | |
| | 71. Bupati Berau | D | Senja | 4.000.000.000 |
| | 72. Bupati Penajem Paser Utara | D | Babulu II | 4.000.000.000 |
| | 73. Bupati Kutai Timur | D | Teluk Pandan | 4.000.000.000 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---|---|---------------|
| XXI | PROVINSI KALIMANTAN UTARA | | | |
| | 74. Bupati Nunukan | D | Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi | 4.000.000.000 |
| XXII | PROVINSI SULAWESI UTARA | | | |
| | 75. Wali Kota Bitung | D | Ustafu | 4.000.000.000 |
| | 76. Bupati Bolaang Mongondow | D | Desa Ibolian | 4.000.000.000 |
| | 77. Wali Kota Manado | D | Buha | 4.000.000.000 |
| XXIII | PROVINSI SULAWESI SELATAN | | | |
| | 78. Bupati Wajo | D | Tempe | 4.000.000.000 |
| | 79. Bupati Jeneponto | D | Pappalluang | 4.000.000.000 |
| | 80. Bupati Soppeng | D | Tajuncu | 4.000.000.000 |
| | 81. Bupati Takalar | D | Soreang | 4.000.000.000 |
| | 82. Bupati Bulukumba | D | Salassae | 4.000.000.000 |
| | 83. Bupati Bantaeng | D | Sino | 4.000.000.000 |
| | 84. Wali Kota Makassar | D | Panakkukang Toddopoli Raya | 4.000.000.000 |
| | 85. Bupati Tana Toraja | D | Bittuang | 4.000.000.000 |
| | 86. Bupati Toraja Utara | D | Nanggala | 4.000.000.000 |
| XXIV | PROVINSI SULAWESI TENGAH | | | |
| | 87. Bupati Tojo Una-Una | D | Kecamatan Tojo | 4.000.000.000 |
| | 88. Bupati Banggai | D | Gori-Gori | 4.000.000.000 |
| XXV | PROVINSI GORONTALO | | | |
| | 89. Bupati Pohuwato | D | Modern Marisa | 4.000.000.000 |
| XXVI | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | | | |
| | 90. Bupati Buton Tengah | D | Wisata Desa Lolibu | 4.000.000.000 |
| | 91. Bupati Kolaka | D | Tandebura | 4.000.000.000 |
| | 92. Bupati Kolaka Timur | D | Penanggo | 4.000.000.000 |
| | 93. Bupati Konawe | D | Tutuwi Motaha | 4.000.000.000 |
| | 94. Bupati Konawe Selatan | D | Margacinta | 4.000.000.000 |
| | 95. Bupati Muna | D | Bahutara | 4.000.000.000 |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------|
| | 96. Bupati Muna Barat | D | Dea Sidamangura | 4.000.000.000 |
| | 97. Bupati Wakatobi | D | Kabupaten 1 | 4.000.000.000 |
| | 98. Wali Kota Bau-Bau | D | Wameo | 4.000.000.000 |
| XXVII | PROVINSI SULAWESI BARAT | | | |
| | 99. Bupati Mamasa | D | Tabang | 4.000.000.000 |
| | 100. Bupati Polewali Mandar | D | Luyo | 4.000.000.000 |
| XXVIII | PROVINSI MALUKU UTARA | | | |
| | 101. Bupati Halmahera Tengah | D | Weda Tengah | 4.000.000.000 |
| | 102. Bupati Halmahera Utara | D | Kao | 4.000.000.000 |
| | 103. Bupati Pulau Morotai | D | Darame II | 4.000.000.000 |
| | 104. Wali Kota Tidore Kepulauan | D | Rum Agromarine | 4.000.000.000 |
| XXIX | PROVINSI MALUKU | | | |
| | 105. Bupati Kepulauan Aru | D | Dobo | 4.000.000.000 |
| | 106. Bupati Maluku Tenggara Barat | D | Selaru | 4.000.000.000 |
| | 107. Bupati Maluku Tengah | D | Masohi | 4.000.000.000 |
| XXX | PROVINSI PAPUA BARAT | | | |
| | 108. Bupati Fakfak | D | Bomberay | 4.000.000.000 |
| | 109. Bupati Teluk Bintuni | D | Sumuri | 4.000.000.000 |
| | 110. Bupati Manokwari Selatan | D | Ransiki | 4.000.000.000 |
| | 111. Bupati Sorong | D | Warmon | 4.000.000.000 |
| XXXI | PROVINSI PAPUA | | | |
| | 112. Bupati Pegunungan Bintang | D | Kampung Distrik Tarup | 4.000.000.000 |
| | 113. Bupati Merauke | D | Kampung Kurik | 4.000.000.000 |
| | 114. Bupati Waropen | D | Sovenir & Kuliner | 4.000.000.000 |
| TOTAL | | | | 456.000.000.000 |

BENCANA

| | | | | |
|--------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| XXXII | PROVINSI BALI | | | |
| | 1. Bupati Tabanan | - | Baturiti | 4.000.000.000 |
| XXXIII | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | | | |
| | 2. Bupati Lombok Utara | - | Pamenang | 4.000.000.000 |
| | | - | Tanjung | 2.500.000.000 |
| | | - | Gondang | 2.500.000.000 |
| | | - | Kayangan | 2.500.000.000 |
| | 3. Wali Kota Mataram | - | Mandalika | 3.000.000.000 |
| | | - | Cakranegara | 2.500.000.000 |
| | 4. Bupati Lombok Tengah | - | Pringgarata | 2.000.000.000 |
| | | - | Batubungus | 2.000.000.000 |
| | | - | Sengkol | 2.000.000.000 |
| | XXIV | PROVINSI SULAWESI TENGAH | | |
| | 5. Bupati Sigi | - | Sigi Biromaru | 6.000.000.000 |
| | 6. Wali Kota Palu | - | Petobo | 4.000.000.000 |
| | 7. Bupati Donggala | - | Damsol | 6.000.000.000 |
| | | | | Tampil Karya Labuan |
| | 8. Bupati Morowali | - | Bumi Raya | 2.000.000.000 |
| | | - | Kolono | 2.500.000.000 |
| TOTAL | | | | 51.000.000.000 |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
Jenderal
SRI HARIYATI

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REVITALISASI
SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

PAKTA
INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Saya
....., Bupati/Walikota, menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019;
2. siap melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2019;
3. pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
4. tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 kecuali berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat;
5. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
6. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas

Pembantuan Tahun Anggaran 2019 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;

7. Melaporkan perkembangan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sesuai ketentuan; dan
8. jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Jakarta, 2019

Menyaksikan

Pembuat Pernyataan

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Kementerian Perdagangan,

Bupati/Wali Kota

(.....)

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI